

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI TAHU

Oleh

Helena Dea Melinda

Industri tahu merupakan salah satu industri pengolahan kedelai yang secara umum berbentuk skala rumah tangga hingga skala kecil. Keterbatasan pengetahuan serta sarana dan prasarana produksi menyebabkan limbah cair tahu dialirkan ke badan air tanpa melalui proses pengolahan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor dari rusaknya ekosistem perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan limbah industri tahu dan upaya yang telah dilakukan dalam mengendalikan limbah industri tahu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam menanggulangi dampak negatif dari limbah industri tahu Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan sebuah kebijakan yang mewajibkan setiap industri tahu dan/atau industri pengolahan kedelai melakukan pengelolaan air limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan. Kebijakan tersebut direalisasikan dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tahu Gunung Sulah yang keberadaannya bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar sebelum dibuang ke badan air, sehingga dinilai mampu efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan limbah tahu. Adapun program pendukung lainnya meliputi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan Program Kali Bersih (Prokasih). Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah melakukan upaya melalui serangkaian kegiatan dalam mengendalikan limbah industri tahu antara lain berupa sosialisasi aturan kebijakan, pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi.

Kata Kunci: Air Limbah, Industri Tahu, Kebijakan Pemerintah

ABSTRACT

CITY GOVERNMENT POLICY IN MANAGING TOFU INDUSTRY WASTE

By

Helena Dea Melinda

The tofu industry is one of the soybean processing industries that are generally in the form of household scale to small scale. Limited knowledge and production facilities and infrastructure cause tofu liquid waste to be flowed into water bodies without going through a treatment process. This is one of the factors in the destruction of aquatic ecosystems. The purpose of this study is to determine the policy of the Bandar Lampung City Government in managing tofu industry waste and the efforts that have been made in controlling tofu industry waste. The type of research used in this research is normative and empirical legal research with data collection through literature study and field study. The data is then analyzed descriptively and qualitatively.

The results of the study state that in overcoming the negative impact of tofu industry waste, the Bandar Lampung City Government establishes a policy that requires every tofu industry and/or soybean processing industry to carry out wastewater management first before being discharged into environmental media. The policy was realized with the construction of the Gunung Sulah tofu Wastewater Treatment Plant (IPAL) whose existence aims to reduce pollutant levels before being discharged into water bodies, so it is considered effective and efficient in overcoming the problem of tofu waste. Other supporting programs include the City Without Slums Program (Kotaku) and the Clean River Program (Prokasih). The Bandar Lampung City Government has also made efforts through a series of activities in controlling tofu industry waste, including socialization of policy rules, guidance and supervision, and sanctions.

Keywords: Wastewater, Tofu Industry, Government Policymakers